

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN
KONSEP 3R DI CENTRAL KOMERSIAL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Tirani

NPM : 17711097

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektorat Universitas Islam Riau, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan

kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

3. Ibu Lilis Suryani, S. Sos., M. Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Bapak Kartius Lesda S. Sos., M. AP selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan berlangsung.
5. Bapak dan ibu dosen ilmu Administrasi Publik yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang mana telah memberikan ilmu dan wawasan yang begitu besar sehingga membantu penulis dalam menyusun proposal penelitian ini.
6. Kedua orang tua saya tercinta, adik – adik, beserta keluarga dan kerabat penulis yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan motivasi baik secara moral dan material kepada saya.
7. Semua teman – teman seperjuangan terutama kelas A jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 dan sahabat – sahabat saya Silvia Enita, Bella Maharani, Rantika Listihara, dan Gina Fadillah yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan.

Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian yang penulis kerjakan ini mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan. Amin ya Allah.

Pekanbaru, 25 November 2021

Penulis

Tirani

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIP SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Administrasi.....	12
2. Konsep Organisasi.....	17
3. Konsep Manajemen.....	19
4. Konsep Implementasi Kebijakan.....	22

5. Konsep Pengelolaan.....	26
6. Konsep Sampah.....	28
B. Kerangka Pikir	31
C. Konsep Operasional Variabel	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Key Informan dan Informan.....	35
D. Teknik Penarikan Sampel	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	40
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	41
B. Gambaran Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	44
1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	44
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	44
3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	46

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	61
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur	63
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	65
1. Faktor Pendorong.....	66
2. Faktor Penghambat.....	78
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Daftar Nama Mall di Kota Pekanbaru.....	7
1.2 : Daftar Nama Pasar di Kota Pekanbaru	8
II.2 : Konsep Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan KOnsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru	33
III.1 : Jumlah Populasi dan sampel di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	35
III.2 : Jumlah Populasi dan Sampel Mall di Kota Pekanbaru	35
V.1 : Klasifikasi Responden Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
V.2 : Klasifikasi Responden Pengelola Mall, Pengelola Pasar, dan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin	62
V.3 : Klasifikasi Responden Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	63
V.4 : Klasifikasi Responden Masyarakat berdasarkan Umur	64
V.5 : Klasifikasi Responden Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
V.6 : Klasifikasi Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	65
V.7 : Visi Misi Kota Pekanbaru	68
V.8 : Surat Perintah Tugas Dalam Pengelolaan Sampah	68
V.9 : Sanksi Pelanggaran Dalam Membuang Sampah Sembarangan.....	70
V.10 : Jumlah Pengelola Sampah dan Petugas Lapangan	78



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Wawancara Penelitian Kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	97
2 : Daftar Wawancara Penelitian Kepada Bapak/Ibu Staff Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	102
3 : Daftar Wawancara Penelitian Kepada Bapak/Ibu Pengelola Mall Pekanbaru	107
4 : Daftar Wawancara Penelitian Kepada Bapak/Ibu Pengelola Pasar Sukaramai	110
5 : Daftar Wawancara Penelitian Kepada Bapak/Ibu Masyarakat Kota Pekanbaru	113
6 : Dokumentasi Penelitian	116
7 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing	121
8 : Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	122
9 : Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP RIAU)	123
10 : Surat Rekomendasi Riset Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	124
11 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi	125

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru

ABSTRAK

Tirani

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengelolaan pemilahan sampah di Central Komersial Kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini yaitu tipe deskriptif metode kualitatif. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R dapat berhasil apabila tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaksana yang tidak memenuhi aturan atau instruksi kebijakan, kuatnya koordinasi antara pembuat keputusan, dan masyarakat mengerti hal apa yang harus dilakukan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R di central komersial kota pekanbaru adalah Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pemilahan sampah kepada masyarakat setempat dengan baik, pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi kepada masyarakat mengenai iuran retribusi sampah tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampha, tidak adanya imbalan atau tunjangan dari pemerintah untuk staf atau petugas lapangan pengelolaan sampah. Kesimpulannya tidak tersedianya fasilitas seperti sarana dan prasarana tong sampah 3R, Lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaksana yang tidak memenuhi aturan atau instruksi kebijakan, jumlah staf dikantor dan petugas lapangan memadai, tetapi kualitas dari petugas pengangkut sampahnya masih kurang, pihak Pemerintah tidak ada menyediakan tong sampah 3R, pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat mengenai iuran retribusi sampah. Hendaknya Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksanaan Teknis pengelolaan sampah perlunya menegakkan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terkait, lebih menerapkan kepatuhan atau instruksi dipusat-pusat keramaian mengenai tong sampah 3R, lebih menguatkan koordinasi antar pembuat keputusan atau kebijakan, dan kepada masyarakat, perlunya meningkatkan kesadaran dalam memilah sampah dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi penumpukan sampah dimana – mana supaya lingkungan tetap bersih dan sehat.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah

***Implementation of Waste Management Policies With 3R Concepts in
Pekanbaru City Commercial Center***

ABSTRACT

Tirani

This study aims to understand the management of waste sorting in the Commercial Central of Pekanbaru City. This type of research is a descriptive type of qualitative method. The implementation of waste management policies with the 3R concept can be successful if sanctions are given to implementers who do not comply with the rules or policy instructions, strong coordination between decision makers, and the community understands what must be done. The obstacles that occur in the implementation of waste management policies with the 3R concept in the central commercial city of Pekanbaru are the absence of socialization carried out by the government regarding waste sorting to the local community properly, the government does not coordinate with the community regarding the retribution fees for the waste, lack of awareness community in sorting waste, there is no reward or allowance from the government for waste management staff or field officers. The conclusion is the unavailability of facilities such as 3R trash can facilities and infrastructure, weak sanctions given to implementers who do not comply with the rules or policy instructions, adequate number of office staff and field officers, but the quality of the garbage collectors is still lacking, the government does not provide trash cans. 3R, the government does not coordinate with the local community regarding waste retribution fees. The Pekanbaru City Environment and Hygiene Service, through the Technical Implementation Unit for waste management, should enforce strict sanctions on related parties, apply more compliance or instructions in crowded centers regarding 3R trash cans, further strengthen coordination between decision or policy makers, and to the public, it is necessary to increase awareness in sorting waste and protecting the environment so that garbage does not accumulate everywhere so that the environment remains clean and healthy.

Keywords: Implementation, Waste Management

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tirani
NPM : 177110597
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Desember 2021
Pelaku Pernyataan,

Tirani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi dimasyarakat telah membawa konsekuensi sosial berupa peningkatan produksi buangan yang semakin beragam baik dalam bentuk volume, jenis dan karakteristik limbah. Timbulan sampah akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Dampak bagi lingkungan sampah dapat mencemari sumber air, tanah, penurunan kualitas udara, pencemaran tanah, meningkatkan gas rumah kaca, bencana banjir, dan permasalahan lainnya. Untuk itu yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah ingin melihat sejauh mana pelaksanaan pengelolaan Central Komersial dengan konsep 3R di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang berkembang , sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru yang dikeluarkan tahun 2020, jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 berjumlah 1.146.075 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2,5% pertahun. Data statistik tahun 2018 menyebutkan volume timbulan sampah kota Pekanbaru mencapai sebesar 492,11 ton/hari, sedangkan volume timbulan sampah yang dikelola dan masuk ke TPA Muara Fajar tahun 2018 sejumlah 447,50 ton/hari, dan hanya 3 -5% sampah yang dikelola masyarakat dengan konsep 3R (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Pekanbaru, 2019). Hal yang perlu diwaspadai adalah proyeksi jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2020 diperkirakan meningkat mencapai 1.334.980 jiwa (Syamsuadi, 2017). Bila rata-rata produksi sampah perorang/hari tetap (0,4 kg/orang/ hari) maka timbulan sampah diperkirakan meningkat menjadi 533,9 ton/hari. Peraturan mengenai pengelolaan sampah sudah dijelaskan dalam UU No 18 tahun 2008 tentang Pengeolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Baik itu sampah yang bersifat organik (mudah membusuk) maupun anorganik (sulit membusuk) yang ada dilingkungan sekitar kita.

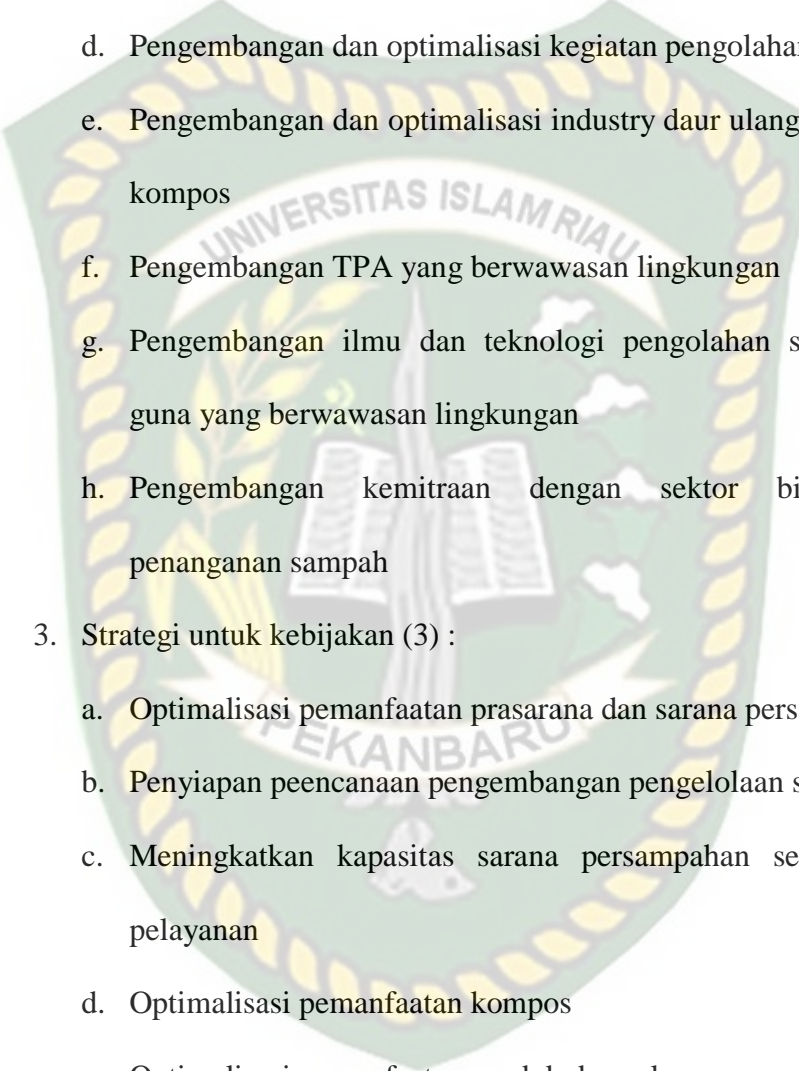
Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 60 Tahun 2015 pada Pasal 5 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Sampah pada Pasal 5 (1) .

(1) Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Persampahan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Kebijakan (1) : Pengurangan sampah dimulai dari sumbernya melalui pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah

- b. Kebijakan (2) : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah
 - c. Kebijakan (3) : Peningkatan akses pelayanan dan pemanfaatan sampah
 - d. Pengembangan kapasitas penyelenggara pengelola sampah
- (2) Strategi Pengembangan Pengelolaan Sampah dirumuskan sebagai berikut :
- 1. Strategi untuk kebijakan (1) :
 - a. Pembatasan timbulan sampah melalui pengembangan produk dan / kemasan yang dapat didaur ulang (*recyclable*) dan dapat terurai di alam (*bio-degradable*) Penerapan EPR
 - b. Pembatasan dan penghindaran penggunaan kantong plastic
 - c. Pengembangan pengolahan sampah disumber
 - d. Penurunan angka timbulan sampah perkapita
 - e. Pengembangan system insentif dan disensitif untuk kegiatan pengurangan sampah
 - f. Penggalakkan kampanye dan edukasi pengelolaan sampah melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*)
 - 2. Strartegi untuk kebijakan (2) :
 - a. Peningkatan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah

- 
- b. Penyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum
 - c. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
 - d. Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah
 - e. Pengembangan dan optimalisasi industry daur ulang dan industry kompos
 - f. Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan
 - g. Pengembangan ilmu dan teknologi pengolahan sampah tepat guna yang berwawasan lingkungan
 - h. Pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis dalam penanganan sampah
3. Strategi untuk kebijakan (3) :
- a. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan
 - b. Penyiapan peencanaan pengembangan pengelolaan sampaah
 - c. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
 - d. Optimalisasi pemanfaatan kompos
 - e. Optimalisasi pemanfaatan produk daur ulang
 - f. Pengembangan pemanfaatan sampah untuk energy alternative (*waste to energy*)
 - g. Pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis dalam pemanfaatan sampah
4. Strategi untuk kebijakan (4) :

- a. Peningkatan kelengkapan produk hukum/NSPK sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan sampah
- b. Optimalisasi fungsi / unit regulator dan operator
- c. Pengembangan data dan informasi pengelolaan sampah
- d. Pengembangan regulasi dan NSPK
- e. Pengembangan dan optimalisasi kelembagaan
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- g. Pengukuran kinerja pengelolaan sampah
- h. Penegakan hukum dan penyelenggaraan pengelolaan sampah

Pasal 13 :

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan oleh :
 - a. Masyarakat
 - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
 - c. Pemerintah kota
 - d. Badan hukum
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS
 - b. TPS 3R

c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah

(3) Pemerintah kota menyediakan TPS atau TPS 3R pada fasilitas umum

(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria teknis :

- a. Luas TPS sampai dengan 200 m²
- b. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5(lima) jenis sampah
- c. Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen
- d. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan
- e. Lokasinya mudah diakses
- f. Tidak mencemari lingkungan
- g. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas
- h. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan bagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebersihan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut, yaitu :

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan
- d. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KotaPekanbaru :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat
- e. Pelaksanan tugas-tugas lain.

Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dimana dalam perkembangannya menerapkan kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan melalui program bank sampah dimana konsep 3R diterapkan.

Tabel I. 1 : Daftar Nama Mall di Kota Pekanbaru

No	Nama Mall	Alamat
1	Mall Pekanbaru (MP)	Jl. Jend Sudirman, Kec Lima Puluh
2	SKA	Jl. Soekarno Hatta
3	Transmart	Jl. Musyawarah, Kec Payung Sekaki
4	Giant	Jl. HR. Soebrantas Panam Kec. Tampan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

Mall Pekanbaru (MP) merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Pekanbaru yang terletak berada di depan Plaza Senapelan yaitu dipersimpangan Jalan Teuku Umar dan Jalan Sudirman. Mall ini adalah pembuka dari sebuah sekuen maraknya pembangunan pusat perbelanjaan modern.

Mall SKA merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang terletak di barat Kota Pekanbaru, mall ini terletak di persimpangan jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Soekarno- Hatta.

Transmart merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang ada di Kota Pekanbaru, mall ini terletak di Jl. Musyawarah Kec. Payung Sekaki

Giant merupakan salah satu gerai atau pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru, Giant pekanbaru ini terletak di Jl. HR. Soebrantas Panam Kec. Tampan.

Tabel I. 2 : Daftar Nama Pasar di Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Kodim	Jl. Ahmad yani, Kec Senapelan
2	Pasar Pusat	Jl. Jend Sudirman (Komp Plaza sukaramai)
3	Pasar Pagi Arengka	Jl. Soekarno Hatta
4	Pasar Sago	Jl. Juanda

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

Sampah terbagi menjadi 3 golongan menurut jenisnya (Sejati, 2009:14) yaitu:

1. Sampah Organik atau basah

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun – daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah, Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk atau hancur) secara alami.

2. Sampah Anorganik atau kering

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya logam, besi, kaleng, plastic, karet, botol, dan kaca.

3. Sampah berbahaya

Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya: baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.

Menurut Gelbert, Prihanto dan Suprihatin (1996), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:

1. Sampah dari permukiman

Sampah ini berupa sampah rumah tangga yang dihasilkan dari suatu kawasan permukiman. Jenis sampah ini biasanya cenderung bersifat seperti organik seperti sisa makanan, atau sampah basah dari dapur. Sampah anorganik seperti plastik, kaleng dan lainlain juga dihasilkan dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding sampah organik.

2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut berpotensi besar menghasilkan sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, plastik dan kaleng-kaleng.

3. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Sampah ini berasal dari tempat-tempat pelayanan masyarakat milik pemerintah seperti rumah sakit, tempat hiburan, pantai, mesjid,

perkantoran dan sarana pemerintah lainnya. Jenis sampah yang dihasilkan dapat berupa sampah kering dan sampah basah

4. Sampah dari industri

Sampah ini berasal dari industri-industri dan berbagai kegiatan industri baik yang termasuk distribusi atau pun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, dan sisa bahan bangunan atau kegiatan industri.

5. Sampah pertanian

Sampah ini dihasilkan dari tanaman atau binatang di daerah pertanian misalnya sampah dari kebun, kandang, atau sawah. Sampah yang dihasilkan umumnya sampah organik.

Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. maka perlu adanya pengelolaan sampah.

Melihat keadaan yang ada, hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang penulis temukan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilah sampah
2. Masih ditemukannya beberapa tumpukan sampah disekitaran pasar
3. Adanya pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah
4. Ditemukannya tidak adanya tong sampah 3R di pusat-pusat keramaian

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru
- b. Apa saja faktor yang penghambat dan pendorong Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dengan Monsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Central Komersial dengan Konsep 3R di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Central Komersial dengan Konsep 3R Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis Bahwa dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan organisasi pemerintah dan dapat memberikan pengembangan ilmu administrasi negara khususnya, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama ini.

- b. Kegunaan Akademis Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
- c. Kegunaan Praktis Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial bahwa dia tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus melakukan kerjasama dengan orang lain yang mempunyai ide dan tujuan yang sama, dengan melakukan administrasi maka tujuan tersebut akan tercapai. Kedudukan administrasi tidak hanya terpaku pada legalistis yang kaku saja, akan tetapi akan berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Administrasi diartikan sebagai :

- a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi
- b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan

- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah
- d. Kegiatan kantor dan tata usaha

Menurut Leonard B. White (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1955;1) menyatakan *“Administration is process common to all group efforts, public or private, civil or military, large scale or small scale...etc.”* White memberikan pemahaman bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat disetiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1983) menyatakan *“Administration is the universal process of efficiency getting activities completed with and through other people”*. Robbins memahami administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerjasama dengan orang lain.

Menurut Dwight Waldo (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1996:24) menyatakan *“Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi”*.

Menurut Gulick (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1937) menyatakan *“Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives”*. Gulick memberikan pemahaman bahwa administrasi adalah berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1959:3) menyatakan *“Administration can be defined as the activities of groups*

cooperating to accomplish common goals". Simon memberikan pemahaman bahwa administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Admkinistrasi sebagai objek ilmu studi ilmu administrasi, merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam arti sempit menurut sudikin dan darmai (2011;4), administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali.

Menurut Ordway tead (dalam zulkifli, 2009;9), administrasi adalah penataan dari kegiatan-kegiatan individu-individu eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-upaya kerja sama kelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Pfifne dan Presthus (2009;7), orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa admnistrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakter) semua usaha bersama.

Menurut Brooks Adams (dalam Syafri, 2012;9), administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lian didalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai suatu kesatuan.

Menurut Galdden (dalam Syafri, 2012;9), langkah pertama adalah mendefinisikan administrasi sebagai aktifitas manusia yang bersifat umum yang

dilaksanakan, baik didalam maupun diluar lingkungan public, dan didalam masyarakat manapun.

Menurut William H.Newman (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1963) menyatakan “*Administration has been defined as the guidance, leadership and control of effort of a group of individuals towards some common goals*”. Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Menurut Sondang P.Siagian (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 2004:2) menyatakan Administasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya .

Sehingga dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pembangian tugas-tugas dan konsensus serta di lakukan dengan rasionalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sekelompok orang tersebut. Administrasi adalah sebagai objek studi ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam masyarakat modern sebagian kegiatan-kegiatan para masyarakatnya dilangsungkan dalam organisasi modern. Dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat hubungannya dengan organisasi.

Administrasi seperti yang kita ketahui di bagi menjadi 2 yaitu administrasi niaga dan administrasi Negara, administrasi niaga merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mendapatkan

keuntungan atau provit. Sedangkan Administrasi Negara adalah keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara dalam rangka mencapai satu atau sejumlah tujuan yang ideal dan substansial yang telah ditetapkan sebelumnya. (Zulkifli, 2005:57)

Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisasi, dilengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan di pimpin, Edward H. Litchfield (Afiffuddin 2010: 24). Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, Atmosudirdjo (Afiffuddin 2010: 24) selanjutnya Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Siagian (dalam Zulkifli, 2005:57).

Sehingga dari konsep-konsep yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan kesepakatan bersama, pembagian tugas dan adanya tujuan yang akan dicapai. Sedangkan Administrasi Negara adalah keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara yaitu pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Negara, Seluruh kegiatan administrasi, tumbuh kembang administrasi dilakukan dalam suatu tempat yang disebut organisasi.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relative serta

tanggung jawab masing-masing individu dan bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja tepat dan sesuai.

Dalam pelaksanaan Administrasi, organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Menurut Stephen P. Robbins (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1990:4) *“An organization is a consciously coordinating social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. That’s mouthful of words, so let us break it down into its more relevant parts.”* Pemahaman Robbins terhadap organisasi dapat diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut John D. Millet (dalam Sutarto 1998:23) *“ In addition organization is people working together, and so it takes on characteristics of human relationships with are involved in group activity”*. Millet memahami organisasi adalah orang-orang yang bekerjasama , ini mengandung ciri-ciri dari hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok.

Organisasi merupakan wadah atau tempat di aplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Siagian (2003: 37) mendefenisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dan hierarkis serta untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai proses Zulkifli (2005; 26), organisasi serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang awali dengan

penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Hasibuan, (2004: 120) adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terakomodasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan wadah atau alat dimana segenap keinginan dan kemampuan sejumlah atau sekumpulan orang bersatu, mengikat diri dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Manurut Syafri (2013;12), organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktifitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Menurut Massie (1964;64), organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggotanya, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Unsur-unsur organisasi :

- a. Dua orang manusia atau lebih
- b. Tujuan (bersama) yang hendak dicapai
- c. Kerjasama (pembagian kerja)
- d. Fasilitas/material/perlengkapan

- e. Legalitas formal/pengakuan dari pejabat yang berwenang

Dari definisi-definisi diatas, bisa terlihat unsur-unsur organisasi yang terdiri dari: kumpulan orang, kerjasama, tujuan bersama serta sumber daya manusia yang semuanya merupakan unsur penting dalam organisasi bila mana tidak dikelola dengan baik maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal untuk mengelola sumber daya organisasi digunakan manajemen dan unsur-unsur dalam manajemen sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasinya, ilmu dan strategi terdapat dalam konsep manajemen dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Manajemen adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapain tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang laon. Manajemen berasal dari kata “*manage*” yang artinya mengatur.

Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Secara umum, manajemen isa diartikan sebagai seni dan ilmu yang mempelajarri bagaimana mengelola manusia dan material untuk mencapai tujuan.

Sebagai alat pelaksana dari administrasi, manajemen diperlukan agar tujuan organisasi bisa dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005: 311) merumuskan batasan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Sebagai mana kita ketahui bahwa dalam setiap organisasi perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen sebagai landasan pencapaian tujuan organisasi begitu juga dengan menggunakan fungsi manajemen pada kantor atau organisasi pemerintahan yang mempunyai tujuan dalam rangka kesejahteraan sosial masyarakat dan menjalankan program-program sosial.

Stoner, et.al. (1996;7) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, menngorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

George R. Terry (dalam Sarwoto 1983: 46) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, and controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetaapkan semula.

Menurut Longenecker (dalam Nawawi, 2013;11), mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengkoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan.

Menurut Mondy dan Premeaux (Syafarudin, 2005;4-42), manajemen adalah proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Andrew (dalam effendi 2014;3), menguraikan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan , pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

The Liang Gie (1993;14), berpendapat bahwa manajemen itu suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama, yaitu : perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.

Siagian (1986;5), merumuskan batas manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen sebagai motor dari suatu system administrasi, secara eksplisit terlihat dalam pendapat Waldo (1986;27), manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasionil dalam suatu sistem adminisrasi.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, ada dua pilihan dan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan public tersebut. Rangkaian implemementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, keproyek, dan kekegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor public. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi dapat diartikan menurut Webster (dalam Wahab, 2005; 50) dengan mengartikan sebagai “mengimplementasikan” yang mempunyai pengertian menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Berdasarkan pandangan ini maka implemementasi kebijakan dapat di pandang sebagai salah satu proses melaksanakan keputusan kebijakan dengan melihat sejumlah factor pelengkap untuk melaksanakan suatu

kebijakan dan menyediakannya agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Lebih rinci lagi Mazmania dan Sabatier (dalam Wahab, 2005; 54) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan itu mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengstrukturkan proses implementasi. Implementasi kebijakan sangat berperan penting dalam suatu proses kebijakan publik yang mana sangat berperan besar dalam mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Menurut Surmayadi (2005; 80) implementasi kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang sesungguhnya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksana kebijakan), perbedaan tersebut tergantung pada implementation capacity dari organisasi birokrasi pemerintahan atau kelompok organisasi/actor yang dipercaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Winarno (2007; 144) mengemukakan bahwa implemtasi kebijakan dipandang dari pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undangt-undang dimana impelementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, teknik bekerja sama dan program-program.

Kemudian Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008: 39) mendefenisasi implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Ada enam variabel Implementasi kebijakan menurut Van meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008: 142) meliputi :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan, dasarnya adalah apa yang hendak di capai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.(Indiahono, 2009: 38).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumber daya financial dan sumberdaya waktu.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplemantasian kebijakan

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Karakteristik agen pelaksana menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi. (Indiahono, 2009: 39)

4. Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. (Agustino, 2008: 143). Sebarapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran. (Indiahono, 2009: 39).

5. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya : seberapa sering rapat rutin di adakan, tempat dan waktu. (Indiahono, 2009: 39).

6. Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi dan turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan dari

pelaksanaan dan mengakibatkan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan.

5. Konsep Pengelolaan

Good Governance adalah sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika professional dalam berusaha / berkarya. *Good Governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan maupun pelayanan publik.

Menurut Sedarmayanti (2003:5). Terdapat 3 model tata pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. *Political governance* adalah suatu yang menitikberatkan pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (*polity / strategy formulation*).
2. *Economic Governance* adalah proses pembuatan keputusan dengan memberikan fasilitas berupa kekayaan (*equity*), (*proverty*), serta kualitas hidup (*quality of life*).
3. *Administrative Governance* adalah sesuatu yang terkait pada sistem implementasi kebijakan.

Prinsip – prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti (dalam United Nations Development Program 2003:7) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. *Rule Of Law* (penegak hukum) yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.
4. Konsensus yaitu perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara musyawarah menjadi konsensus.
5. Responsiveness (daya tanggap) yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
6. Efektivitas dan efisiensi yaitu pemerintah harus efektif dan efisien dalam proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah diinginkan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas yaitu suatu perwujudan kewajiban dari instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawaban.

Menurut Zulkarnain (2002:21) *good Governance* merupakan suatu yang baru bagi masyarakat dimana aplikasi daripada konsep ini sering kali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintahan yang bersih dan demokratis.

6. Konsep Sampah

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Selanjutnya Menurut Undang – Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya pengertian yang sama tentang sampah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia.

Sedangkan Menurut Azwar Azrul (1979: 54) pengertian sampah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan industri, tetapi bukan biologis karena human waste tidak termasuk didalamnya.

Pendapat para ahli Sudrajat (2006:15) pengelolaan sampah adalah dikerjakan sedemikian hingga dapat dimanfaatkan, atau diproses sedemikian sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia, maka perlu pengaturan pembuangannya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah yaitu

- a. Penyimpanannya
- b. Pengumpulan
- c. Pembuangan akhir sampah

d. Pengelolaan sampah

Sampah adalah sesuatu yang tak digunakan , tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia itu dan tidak terjadi dengan sendirinya (Mochtar (1987: 55))

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa golongan, Mochtar (1987: 55), yang didasarkan pada asalnya:

- a. Pasar, tempat – tempat komersial
- b. Pabrik – pabrik atau industri
- c. Rumah tinggal kantor, sekolah, institusi, gedung – gedung umum
- d. Sekolah
- e. Dan lain sebagainya.

7. Konsep 3R

Pada prinsipnya, konsep 3R ini dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada kawasan, untuk mengurangi beban sampah yang harus diolah secara langsung di TPA sampah. Konsep ini memiliki inti yakni :

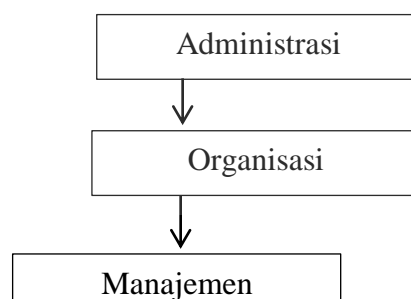
- Reuse , yaitu menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan
- Reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah
- Recycle, yaitu mengolah kembali sampah yang akan didaur ulang

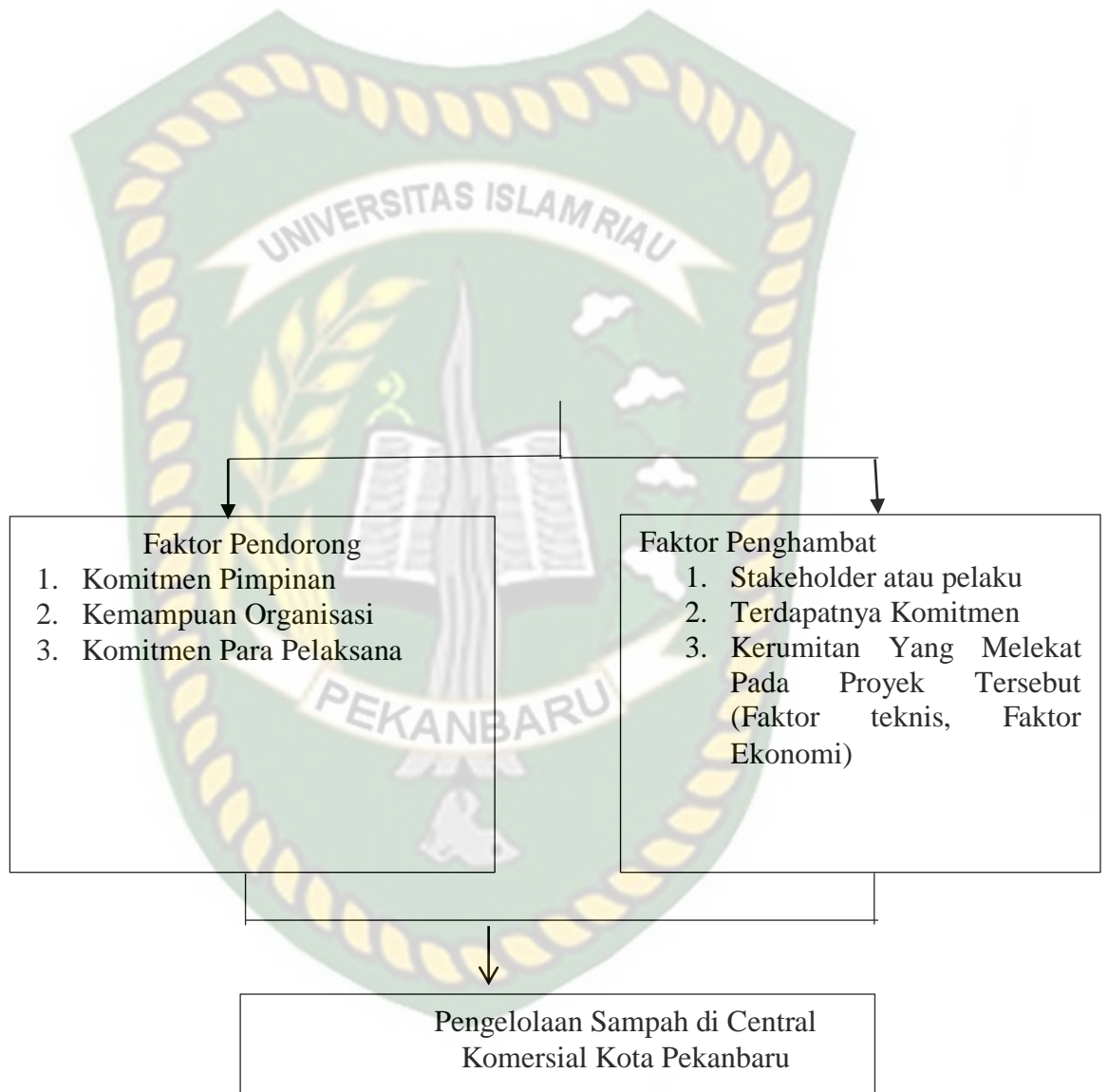
B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari teori – teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1 : Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru





Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralsir kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional yang juga merupakan batasan penelitian. Defenisi operasional adalah suatu

defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi adalah keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara yaitu pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Negara
2. Organisasi adalah bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam ikatan yang terdapat seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan
3. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.
4. Implementasi kebijakan adalah merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn ; dalam Wibawa et al., 1994: 19).
5. Sampah adalah sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

6. Komitmen pimpinan adalah salah satu faktor untuk menjalankan suatu proses kebijakan yang berhubungan dengan tekad dan kemauan yang kuat dari pimpinan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan
7. Kemampuan organisasi merupakan salah satu faktor pendorong dalam pencapaian tujuan. Didalam sebuah organisasi harus memiliki interaksi antar anggotanya agar proses dalam berorganisasi tersebut tercapai.
8. Komitmen para pelaksana juga bisa diartikan sebagai kemampuan atau kemauan untuk menyelaraskan perilaku antar pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuannya.
9. Stake holder atau pelaku, didalam Implementasi Kebijakan, kegagalan yang sering terjadi adalah dikarenakan staf atau pegawai yang tidak memadai atau mencukupi, ataupun tidak ahli dalam bidangnya.
10. Komitmen pelaku adalah salah satu faktor untuk menjalankan suatu proses kebijakan yang berhubungan dengan tekad dan kemauan yang kuat dari pimpinan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
11. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itulah upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
12. Pengelolaan Sampah di Central Komersial Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintahan yang memiliki peran dalam mengurus kebersihan suatu daerah



Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4	Item Penilaian 5
Marwick menyatakan dalam implementasi kebijakan atau program terdapat dua kategori faktor yang bekerja serta mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi tersebut(2008 : 17)	Implementasi kebijakan	1. Faktor Pendorong	a. Komitmen Pimpinan b. Kemampuan Organisasi c. Komitmen Para Pelaksana	a. Perencanaan b. Adanya sanksi hukum bagi pelanggar komitmen a. Adanya kerjasama sektor public dan privat b. Adanya kepatuhan petugas dalam SOP (Standar Operasional Variabel) a. Adanya keterlibatan atau partisipasi antar pihak terkait pengelolaan sampah b. Pemberian Insentif atau imbalan antar pihak terkait pengelolaan sampah

		2. Faktor Penghambat	<p>a. Stakeholder atau pelaku</p> <p>b. Komitmen Pelaku</p> <p>c. Kerumitan Yang Melekat Pada Proyek Tersebut (Faktor Ekonomi, Faktor Teknis)</p>	<p>a. Pengelola atau Sumber daya manusia</p> <p>b. Petugas lapangan</p> <p>a. Adanya sarana dan prasarana</p> <p>a. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya</p> <p>b. Membayar retribusi sampah</p>
--	--	----------------------	---	--

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sehingga dapat diketahui metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang sistematis.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu tentunya dalam penelitian ini analisa terhadap permasalahan yang diteliti, dan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan, serta kalimat-kalimat sebagai hasil pengumpulan datanya.

Menurut dalam buku Sugiono (2016:9), mengartikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan alasan yang mana seperti yang kita

ketahui bahwa sampah di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan memiliki jumlah volume sampah tertinggi

C. Key Informan dan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang bagaimana latar belakang kondisi penelitian. Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Key Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris, Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Retribusi, Pengelola Sampah, Pengelola Mall/Pasar, dan juga masyarakat.

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan sampel di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Bidang Pengelolaan Sampah	1	1
4	Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah	1	1
5	Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah	1	1
6	Seksi Sarana dan Prasarana	1	1
7	Seksi Retribusi	1	1
Jumlah		7	7

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021

Tabel III.2: Jumlah Populasi dan Sampel Mall di Kota Pekanbaru

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Pengelola Mall/Pasar	6	4
2	Masyarakat	14	4

Jumlah	20	8
--------	----	---

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, dalam Saputra, 2019).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Sekretaris, Bidang Pengelolaan Sampah, Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Retribusi, Pengelola Sampah, Pengelola Mall/Pasar digunakan teknik *purposive sampling* yang istilah lain adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kata lain unit sampel yang digunakan disesuaikan dengan kriteria – kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.
- b. Untuk masyarakat digunakan teknik penarikan sampel menggunakan penarikan sampel *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer berupa data ataupun tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan merupakan hasil pengumpulan data yang berada di lokasi penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik wawancara maupun dokumentasi serta pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pola “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru”

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dan kemudian untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik melalui studi kepustakaan berupa buku – buku, dokumen maupun data yang diperoleh dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini sehubungan dengan kegiatan – kegiatan mengenai pengelolaan sampah.
2. Wawancara, penulis mengumpulkan informasi dengan cara wawancara dengan responden, penulis menyiapkan penelitian berupa pertanyaan –

pertanyaan secara tertulis tentang pengelolaan sampah yang dijadikan penulis untuk mewawancarai responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.

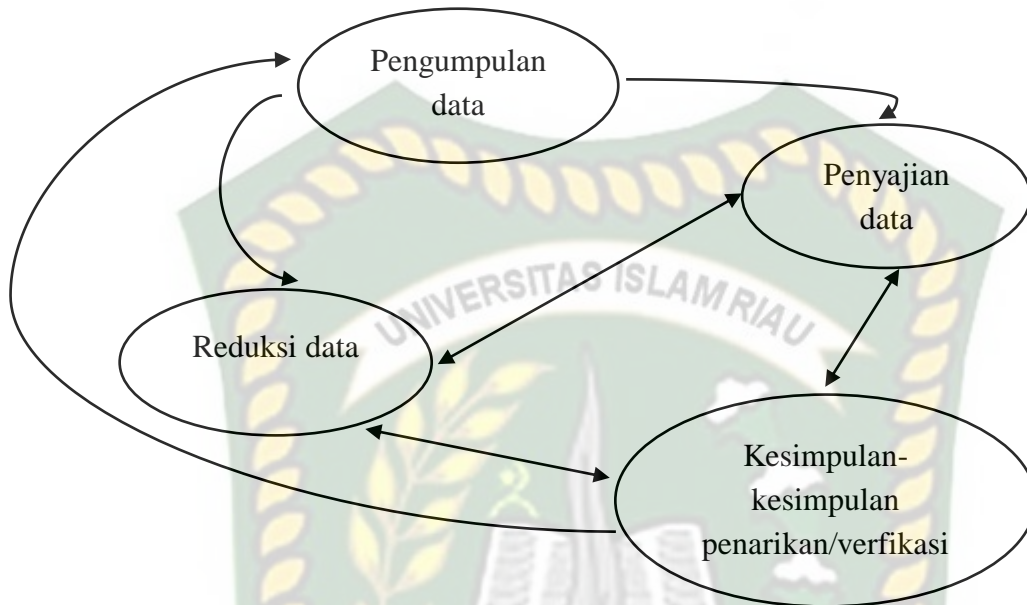
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada peneliti ini dalam bentuk foto, gambaran, dan lain – lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto – foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui alat penelitian berupa daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikumpulkan dan diolah secara kualitatif. Kemudian dipresentasikan dan jelaskan serta dianalisis secara deskriptif sesuai dengan data yang didapat guna menganalisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut.

Secara skematis proses analisa data menggunakan proses analisis data menggunakan model analisis data dan interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III.1: Model analisis data dan interaktif Miles dan Huberman



a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, menetik data lapangan atau memilah-memilah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemiloihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, bagan, dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan ytersusun sehingga akan semain mudah dipahami

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verrifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Tabel III. 3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke																											
		Feb				Mar				Apr				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																								
2	Ujian Proposal							■																					
3	Revisi Proposal											■																	
4	Kuesioner											■																	
5	Rekomendasi Survey															■													
6	Survey Lapangan															■													
7	Analisis Data																			■									
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																							■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																											■	
10	Ujian Konfrensis Skripsi																											■	
11	Revisi Skripsi																												■
12	Pengandaan Skripsi																												■



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota pekanbaru merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau, yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi. Sehingga Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi di Riau. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industry terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, dan juga pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini kota pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pekanbaru pada saat ini, telah berkembang pesat menjadi sebuah kota perdagangan yang cukup prospek atau pun pesat, mengingat posisinya berada pada jalur internasional yang strategis. Pembangunan kota Pekanbaru sendiri

cukup mengalami peningkatan signifikan, dibukanya berbagai pusat perbelanjaan modern seperti Mall, bandar udara internasional, perpustakaan wilayah yang megah, fly over, pusat bisnis kawasan mtq, dan juga pembangunan monument Bahasa yang megah oleh pemerintah Provinsi Riau.

Perkembangan perdagangan di Kota Pekanbaru ini dijangkakan akan semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kota ini bahkan sempat mendapat julukan sebagai “kota seribu ruko” . Secara Geografis, Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101’34’ BT dan 0’25’-0’45’ LT dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 5-50 meter. Adapun batas-batas kota Pekanbaru adalah :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak

Kota Pekanbaru mempunyai Iklim Tropis dengan suhu udara maksimum 30-33 derajat dan suhu maksimum 11,5-15,55 derajat. Sebagaimana daerah lainnya yang beriklim Tropis di Kota Pekanbaru terdapat dua musim, kemarau dan hujan. Luas Wilayah Kota adalah 632,26 km, yang terdiri dari 12 kecamatan dan 60 kelurahan.

Kota Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau yang memiliki suatu jarak waktu tempuh dengan kota-kota atau kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang sebagai Ibu Kota Provinsi Riau.

Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha menjaga kebersihan Kota dengan terus berupaya mengurangi tumpukan sampah rumah tangga, sampah mall, sampah pasar, industry dan lain sebagainya yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya di jalan-jalan protokol di Pekanbaru dengan menangani tumpukan-tumpukan sampah, yang dimana bisa kita lihat jumlah konsumsi masyarakat yang kita lihat dari jumlah penduduk yang memiliki jumlah sebanyak 1.093.416 jiwa dengan kepadatan 1.655/km.

B. Gambaran Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Visi

Terwujudnya kota Pekanbaru sebagai kota terbersih, hijau, dan gemerlap menuju kota metropolitan yang madani

Misi

1. Menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota terbersih
2. Menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota terhijau
3. Kota Pekanbaru sebagai kota yang hijau
4. Kota Pekanbaru sebagai kota yang gemerlap
5. Kota Pekanbaru sebagai kota madani

6. Kota pekanbaru sebagai kota metropolitan

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas DLHK Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2008 pasal 594 dan 595 mempunyai rincian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan
- f. Merumukan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakanteknis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan,
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan

- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan
- e. Pelaksanaan dan pengesahan naskahdinas sesuai dengan kewenangannya
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- g. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan dinas
- h. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- i. Pengelolaan keuangan dinas
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

2. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungagn Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian, pelaksanaan program reformasi birokrasi
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan

- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(1). Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
 - Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan
 - Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data informasi Sub Bagian Umum
 - Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
 - Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas
 - Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas
 - Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan , penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan,

pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah

- Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan, dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan dinas
 - Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan dan registrasi ASN, serta persiapan penilaian prestasi kerja ASN dilingkungan dinas
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Sub Bagian Keuangan
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
 - Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar
 - Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan
 - Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
 - Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas

- Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, Investarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Pelaksanaan peyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik selain tanah dan bangunan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Sub Bagian Program
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta Perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA, laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja
 - Pengumpulan data informasi untuk pembangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana
 - Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan
 - Perumusan, pelaksanaan, dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program
 - Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa
 - Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Tata Lingkungan

Tugas pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan inventaris data dan informasi sumber daya alam
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan, dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis
- f. Pelaksanaan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai andal
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan

- j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca
 - k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman HUTan raya (TAHURA) dalam satu daerah kota
 - l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati
 - m. Pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
 - n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bidang Tata Lingkungan Terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam

- b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- d. Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- e. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup
- f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
- g. Penyusunan status lingkungan hidup daerah
- h. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan ntentang RPPLH
- j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota
- k. Pelaksanaan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengeloaan Sampah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusuna informasi pengelolaan sampah tingkat kota

- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping
- i. Perumusan system tanggap darurat pengelolaan sampah
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - b. Pelaksanaan Koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah)
 - d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
 - e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institusi dan non institusi
 - f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar
 - g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roga tiga (3), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bidang Pengelolaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang terdiri dari :

❖ **Seksi Pemantauan Lingkungan**

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah
- d. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah)

❖ **Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi
- b. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemaran
- c. Perencanaan dan pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- e. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi

❖ **Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah**

Bahan Berbahaya dan Beracun

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam suatu daerah kota
- b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam suatu daerah kota
- c. Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam suatu daerah kota
- d. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 yang dilakukan dalam suatu daerah kota
- e. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dalam suatu daerah kota
- f. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis
- g. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun pengadilan
- c. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pegawai lingkungan hidup daerah
- e. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
- f. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
- g. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian dan penghargaan lingkungan hidup
- h. Pengembangan system informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari :

❖ **Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Pelaksanaan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas haassil tindak lanjut pengaduan
- f. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawasan lingkungan hidup daerah
- h. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum
- i. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup
- j. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
- k. Penanganan barang bukti dan penangan hukum pidana secara terpadu

❖ **Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan**

- a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hal Masyarakat Hukum Adat, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional, hak MHA, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitas kerja, pendampingan dan pemberdayaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan
- e. Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang kompeten
- f. Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional
- g. Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan database informasi lingkungan

- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan system informasi lingkungan hidup berbasis web
- i. Perencanaan, penyiapan bahan dan penertiban bulletin atau majalah informasi lingkungan
- j. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan dibidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga profesi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya
- k. Pelaksanaan mtugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ **Seksi Retribusi dan Penagihan**

- a. Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan
- b. Pelaksanaan inventarisasi, potensi retribusi, perhitungan dan penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- c. Penetapan penyediaan alat pungut yang sah, pengelolaan daftar wajib retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan dari jasa layanan pengelolaan sampah
- d. Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah

- e. Penyusunan daftar pelanggan, tunggakan, dan pelaksanaan penagihan retribusi
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam menentukan keberhasilan hasil penelitian penulis yang berperan penting disini adalah responden, karena didalam penelitian ini penulis mengangkat masalah tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru, jadi data-data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari pegawai atau staff Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan juga petugas pengelola sampah berjumlah 12 orang, pengelola mall 2 orang, pengelola pasar 2 orang, dan masyarakat 14 orang dengan melakukan wawancara.

Berhubung dengan penelitian tentang Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep di 3R di Central Komersial , maka disini penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin,usia dan pendidikan. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

5. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru, maka adapun identitas responden penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel V. 1: Klasifikasi Responden Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1	Laki-laki	8	66,7%
2	Perempuan	4	33,3%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan table diatas dapat diketahui responden penelitian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan juga petugas pengelola sampah yang dijadikan sampel dalam penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru adalah dominan laki-laki dengan jumlah 8 orang (66,7%). Dan jumlah responden perempuannya berjumlah 4 orang (33,3%), dan total keseluruhan keseluruhannya 12 orang responden Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru..

Tabel V. 2: Klasifikasi Responden Pengelola Mall, Pengelola Pasar, dan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Laki-laki	10	55,5%
2	Perempuan	8	44,5%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui responden penelitian Pengelola Mall, Pengelola Pasar, dan juga masyarakat , laki-laki berjumlah 10 orang (55,5%) dan perempuan berjumlah 8 orang (44,5%). Total keseluruhan responden sebanyak 18 orang.

6. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil penelitian dengan Judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru, adapun identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan umur sebagai berikut.

Tabel V. 3: Klasifikasi Responden Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Umur	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	≤ 25 Tahun	-	-
2	25-39 Tahun	7	58,4%
3	40-49 Tahun	4	33,3%
4	≥50 Tahun	1	8,3%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan table diatas dapat diketahui responden penelitian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan

Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru adalah dominan umur 25-39 tahun dengan jumlah responden sebanyak 7 orang (58,4%), responden umur 40-49 tahun sebanyak 4 orang (33,3%), dan responden umur diatas 50 tahun 1 orang (8,3%). Total keseluruhan responden 12 orang.

Tabel V. 4: Klasifikasi Responden Masyarakat berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	≤ 25 Tahun	-	-
2	25-39 Tahun	7	38,8%
3	40-49 Tahun	9	50%
4	≥50 Tahun	2	11,2%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan table diatas, maka dapat kita ketahui bahwa responden masyarakat terbesar usia 25-39 tahun dengan jumlah responden 7 orang (38,8%). Responden umur 40-49 tahun sebanyak 9 orang (50%), dan responden umur 50 tahun keatas sebanyak 2 orang(11,2%). Total keseluruhan responden berdasarkan umur aebanyak 18 orang.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3Rdi Central Komersial Kota Pekanbaru, maka identitas responden penelitian berdasarkan pendidikan yang digunakan sebagai berikut.

Tabel V. 5: Klasifikasi Responden Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	3	25%
4	DIPLOMA	1	8,3%
5	S1	7	58,4%
6	S2	1	8,3%

Jumlah	12	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan responden Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, SMA sebanyak 3 orang (25%), Diploma sebanyak 1 orang (8,3%), Responden terbesar adalah S1 sebanyak 7 orang (58,4%), dan jenjang S2 sebanyak 1 orang (8,3%). Total keseluruhan responden sebanyak 12 orang.

Tabel V. 6: Klasifikasi Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	15	83,3%
4	DIPLOMA	-	-
5	S1	2	11,1%
6	S2	1	5,6%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan responden masyarakat yang dominan adalah SMA sebanyak 15 orang(55,6%), jenjang S1 sebanyak 2 orang (11,1%), dan jenjang S2 sebanyak 1 orang (5,6%). Total keseluruhan responden adalah 18 orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru

Adapun beberapa indikator yang akan penulis paparkan dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru berdasarkan teori dan konsep dari

Marwick (2008 : 17). Dan adapun indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ada faktor Pendorong dan Faktor Penghambat.. Didalam Indikator tersebut dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang gunanya untuk atau sebagai alat yang menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari dan mengumpulkan jawaban dan juga hasil penelitian.

1. Faktor Pendorong

Menurut Marwick (2008 : 17), keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada faktor pendorong. Adapun Faktor pendorong dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan itu ada Perencanaan, Komitmen Pimpinan Politik, Kemampuan Organisasi, dan Komitmen Pelaksana. Faktor pendorong juga bisa diartikan sebagai suatu hal atau kondisi yang dapat membangkitkan atau menumbuhkan suatu kegiatan atau usaha agar dalam sebuah kebijakan tersebut membuahkan hasil.

1.1 Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan adalah salah satu faktor untuk menjalankan suatu proses kebijakan yang berhubungan dengan tekad dan kemauan yang kuat dari pimpinan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Komitmen juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan individu dimana individu tersebut menjadi terikat oleh tindakannya. Melalui tindakan inilah akan menimbulkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Komitmen para pelaksana juga bisa diartikan sebagai kemampuan atau kemauan untuk menyelaraskan perilaku antar pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuannya. Hal ini mencakup cara-cara

mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009)

1.1.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan faktor utama untuk menjalankan suatu proses kebijakan. Perencanaan merupakan suatu bagian yang sangat penting dan juga tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari aktivitas sebuah implementasi. Perencanaan juga merupakan suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi atau pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah karena perencanaan yang belum matang. Perencanaan adalah beberapa proses dimulai dengan sasaran-sasaran, kebijakan, batasan strategi, serta juga rencana terperinci untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, serta juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Adil Putra, ST., MT sebagai Bidang Pengelolaan Sampah pada tanggal 7 Juli 2021, mengenai Perencanaan untuk menjalankan proses kebijakan tersebut, ia mengatakan bahwa :

“Perencanaan dalam sebuah instansi sangat penting dan perlu, karna ujung tombak suatu keberhasilan sesuatu itu pasti nya ada sebuah perencanaan yang matang sehingga bisa tercapainya sebuah organisasi, dan terlaksananya visi misi Pekanbaru sebagai Kota terbersih, hijau, dan gemerlap. Dalam sebuah perencanaan berarti sudah siap dalam mengambil keputusan dengan berbagai alternative, perencanaan dapat menetapkan target dalam pengambilan sebuah keputusan, hal ini juga menetapkan kriteria untuk mengevaluasi sebuah tindakan yang akan kita ambil. Jadi dalam sebuah kebijakan, perencanaan sangat mempunyai peran utama ”

Tabel V.7: Visi Misi Kota Pekanbaru

No	Visi	Misi
1	Terwujudnya kota pekanbaru sebagai kota terbersih,hijau, dan gemerlap menuju kota metropolitan yang madani	1. Menjadikan kota pekanbaru sebagai kota terbersih 2. Menjadikan kota pekanbaru sebagai kota terhijau 3. Kota pekanbaru sebagai kota yang gemerlap 4. Kota pekanbaru sebagai kota madani 5. Kota pekanbaru sebagai kota metropolitan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan table V.7 diatas dapat dijelaskan bahwa visi misi di Kota pekanbaru mewujudkan sebagai kota terbersih, hijau, dan gemerlap menuju kota metropolitan yang madani. Sehingga terdapat surat perintah dalam mengelola sampah. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel : V.8 : Surat Perintah Tugas Dalam Pengelolaan Sampah

No	Surat Perintah Tugas Dalam Pengelolaan Sampah
1	Melaksanakan tugas pengelolaan sampah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan sampah
2	Melakukan pemungutan retribusi sampah sesuai tarif yang telah diatur pada Peraturan Daerah no 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
3	Menyetorkan hasil pungutan retribusi sampah setiap harinya kepada Pemerintah Daerah (Pemda)
4	Melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat dijelaskan bahwa Surat Perintah Tugas Dalam Pengelolaan Sampah sudah jelas peraturan untuk koordinator dan juru sampah di Kota Pekanbaru.

Mengenai perencanaan untuk menjalankan proses kebijakan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Reino sebagai staff di Workshop pada tanggal 7 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan sampah, harus sesuai dengan visi-misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mewujudkan Kota yang madani, terwujudnya kota pekanbaru sebagai kota terbersih, hijau, dan gemerlap, karena sebuah perencanaan sangat perlu diperlukan dalam sebuah instansi”

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Haryanto sebagai salah satu staff di Pasar Sukaramai Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2021 tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“Dalam perencanaan yang sudah disepakati dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, bahwa dalam proses pengangkutan sampah tidak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru, seperti tidak tepat waktu dalam memungut sampah sehingga terjadi penumpukan ditepi pasar dan tidak ada menyediakan fasilitas sarana dan prasarana seperti tong sampah 3R”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa tidak jalannya sebuah perencanaan dalam sebuah kebijakan, tidak tepat waktu dalam memungut sampah dan tidak tersedianya fasilitas sarana dan prasarana tong sampah 3R.

1.1.2 Adanya Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Komitmen

Implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh oleh Komitmen pimpinan politik. Implementasi kebijakan publik yang harus berusaha untuk merubah perilaku manusia, maka komitmen pimpinan politik proyek itulah yang

harus berkarakter tegas dan keras dalam menjalankan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Tabel V.8: Sanksi Pelanggaran Dalam Membuang Sampah Sembarangan

No	Sanksi Pelanggaran Dalam Membuang Sampah Sembarangan
1	Diberi Teguran
2	Apabila masyarakat membuang sampah sembarangan dikenakan denda sebesar Rp.250.000,00
3	Masyarakat tidak boleh membuang sampah di TPS mulai dari waktu pukul 06.00 WIB hingga 19.00 WIB

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan Tabel V.7 diatas, dapat dijelaskan bahwa pelanggaran dalam membuang sampah sembarangan sudah ada aturannya didalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Adil Putra, ST., MT sebagai Bidang Pengelolaan Sampah, pada tanggal 7 Juli 2021 mengenai Sanksi Pelanggaran membuang sampah sembarangan tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“Disetiap instansi pasti mempunyai sanksi apabila melanggar sebuah peraturan, adapun sanksi bagi orang yang membuang sampah sembarangan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014, sekalipun ada sanksi masyarakat masih tidak peduli bahkan banyak yang tidak patuh terhadap peraturan.”

Mengenai Sanksi Pelanggaran Membuang sampah sembarangan juga melakukan wawancara dengan Bapak Reino sebagai staff di Workshop pada tanggal 7 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Bahwa masyarakat tidak paham cara memilah sampah, masyarakat sering tidak patuh terhadap peraturan yang ada tentang membuang

sampah sesuai dengan tong sampah 3R, , dan masyarakat juga sering membuang sampah sembarangan, untuk sanksinya sudah ada aturan apabila masyarakat tertangkap tangan atau basah akan dikenakan denda sebesar Rp.250.000,00”

Selanjutnya penulis melakukan observasi mengenai sanksi pelanggaran membuang sampah sembarangan dan turun lapangan langsung mewawancarai Ibu Yusnita sebagai masyarakat ruko pada tanggal 10 Juli 2021, yang membuang sampah di TPS dari jam 05.00 WIB hingga jam 19.00 WIB, ia mengatakan bahwa :

“Petugas Lapangan tidak tepat waktu mendatangi ruko untuk mengambil sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah diruko-ruko tersebut, dan untuk masalah retribusi sampahnya sudah dipungut oleh petugas sampah”

Dilakukan juga wawancara dengan Ibu Euis sebagai masyarakat umum diwilayah pasar Sukaramai pada tanggal 10 Juli 2021, yang mengatakan bahwa:

“ Dari petugas lapangan sendiri tidak ada konfirmasi atau sosialisasi dengan masyarakat setempat mengenai waktu yang tepat untuk membuang sampah, dan tidak ada sosialisasi mengenai tong sampah yang harus dipilah seperti tong sampah 3R, sejauh ini belum ada terlihat pemerintah menyediakan tong sampah 3R dan juga tidak ada pemerintah turun lapangan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa lemahnya sanksi pelanggaran membuang sampah sembarangan seperti masyarakat membuang sampah tidak tau adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat tidak tau cara memilah sampah yang baik dan benar, sampah tersebut tidak hanya dari sampah sampah ruko, tetapi juga berasal dari sampah-sampah masyarakat umum. Masyarakat pun

tidak tahu kapan waktu membuang sampah yang tepat, sedangkan pemerintah tidak tegas atau tidak melaksanakan terhadap sanksi yang dibuatnya apabila masyarakat melanggarnya, oleh karena itu masyarakat tidak menaati peraturan yang ada.

2.1 Kemampuan Organisasi

Kemampuan dalam berorganisasi merupakan salah satu faktor pendorong dalam pencapaian tujuan. Didalam sebuah organisasi harus memiliki interaksi antar anggotanya agar proses dalam berorganisasi tersebut tercapai.

Dalam konteks penelitian ini Kemampuan Organisasi dapat kita lihat dari adanya kerjasama atau menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam sektor yang sama dan adanya kepatuhan petugas dalam SOP.

2.1.1 Adanya Kerjasama Antar Sektor Public dan Privat

Dalam hal guna mencapai tujuan kebijakan perlu cakupan implementasi kebijakan yang luas, maka seharusnya semakin besar pula yang terlibat. Dalam hal ini pihak DLHK pengelolaan sampah bekerjasama dengan Pihak Swasta, dan adanya Bank Sampah yang terdapat di Muara Fajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Adil Putra, ST., MT sebagai Bidang Pengelolaan Sampah, pada tanggal 7 Juli 2021 mengenai Adanya kerjasama atau menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam sektor yang sama tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pengelolaan sampah dalam mengangkut sampah di Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak swasta dan bank – bank sampah. Sampah – sampah yang diangkut oleh petugas pengangkut sampah di TPS dan dibawa ke TPA kemudian dilakukan pemilahan oleh pihak dari bank sampah supaya bisa diolah menjadi barang yang ada nilainya dan bisa dijual”

Mengenai adanya kerjasama atau menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam sektor yang sama juga melakukan wawancara dengan Bapak Reino sebagai staff di Workshop pada tanggal 7 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Kerjasama antara pihak DLHK dengan pihak swasta memang ada, seperti Mall-mall dan pasar di Pekanbaru ada bekerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Veronica sebagai Staff pengelola Mall Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2021 tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“Untuk masalah Sampah Mall Pekanbaru memang ada kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, tetapi untuk masalah pengangkutan sampahnya dari pihak ketiga”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa mengenai adanya kerjasama atau menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam sektor yang sama , dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memang ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengangkut sampah Mall-mall dan Pasar-pasar di Kota Pekanbaru.

2.1.2 Adanya Kepatuhan Petugas Dalam SOP (Standar Operasional Prosedur)

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu aktivitas yang terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau para pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, ataupun birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

No	Standar Operational Prosedur (SOP) petugas pengangkut sampah
1	Menentukan lokasi / titik pengumpulan sampah (TPS dan Tumpukan Sampah pada Jalur/Rute)
2	Berdasarkan data lokasi pengumpulan, membuat data petugas,jalur/ rute, jadwal ritasi pengambilan dan kebutuhan BBM.
3	Melaksanakan Pengisian BBM pada armada angkutan sampah.
4	Melaksanakan pengecekan kondisi armada dan aramada dalam kondisi engine hidup serta kelengkapan APD Petugas Angkutan Sampah.
5	Melaksanakan tugas pe ngangkutan sampah sesuai dengan jalur / wilayah yang sudah ditentukan.
6	Mengirimkan laporan kondisi sebelum dan sesudah pembersihan dan pengangkutan ke Mandor
7	Mengirimkan hasil pengangkutan sampah ke TPA
8	Melaksanakan kegiatan pembersihan armada dan kesiapan armada untuk kegiatan besok hari.
9	Menuju ke garasi.
10	Selesai.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan, 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Adil Putra, ST., MT sebagai Bidang Pengelolaan Sampah, pada tanggal 7 Juli 2021 mengenai kepatuhan petugas pada Standar Operasional Prosedur , beliau menjelaskan bahwa :

“Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sendiri sudah melaksanakan atau melakukan tugas sesuai dengan tupoksi yang berlaku, baik itu staf atau pun petugas dilapangan yang mengelola dan mengangkut sampah. Petugas pengangkut sampah sendiri bekerja setiap hari untuk mengangkut sampah mall dan sampah pasar, kalau dari pihak petugas pengangkut sampah sendiri tidak mengangkut sampah sehari saja maka sampah tersebut akan menumpuk”

Mengenai adanya kepatuhan petugas pada Standar Operasional Prosedur juga melakukan wawancara dengan Bapak Reino sebagai staff di Workshop pada tanggal 7 Juli 2021, ia mengatakan bahwa :

“Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah melakukan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu dari staff nya ataupun dari petugas lapangan”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa fakta yang terungkap sejalan dengan faktor Kemampuan Organisasi para pelaksana pengelolaan sampah di Central Komersial Kota Pekanbaru. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan petugas pengelolaan sampah sudah bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

3.1 Komitmen Para Pelaksana

Komitmen para pelaksana bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keputusannya. Komitmen para pelaksana juga bisa diartikan sebagai kemampuan atau kemauan untuk menyelaraskan perilaku antar pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuannya. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009)

3.1.1 Adanya Keterlibatan atau Partisipasi Antar Pihak Terkait Pengelolaan Sampah

Dalam mencapai tujuan kebijakan , perlu cakupan implementasi kebijakan yang luas, maka seharusnya semakin besar pula komitmen para

pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Weni Arizona S.Km pada tanggal 7 Juli 2021 sebagai Bidang Pengelolaan Sampah mengenai Komitmen Para Pelaksana terkait dengan adanya kerjasama, keterlibatan atau partisipasi antar pihak terkait pengelolaan sampah, beliau mengatakan :

“Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pengelolaan sampah dalam melakukan pengangkutan sampah bekerjasama dengan bank-bank sampah. Sampah-sampah tersebut diangkut oleh petugas pengangkut sampah di TPS ke TPA, kemudian dilakukan pemilahan dari pihak bank sampah supaya bisa dijadikan barang yang ada nilainya atau yang bisa dijual.”

Mengenai adanya kerjasama, keterlibatan atau partisipasi antar pihak terkait pengelolaan sampah juga melakukan wawancara dengan Bapak Reino sebagai staff di Workshop pada tanggal 7 Juli 2021, ia mengatakan bahwa :

“Pihak Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru pengelolaan sampah dalam melakukan pengangkutan sampah dengan pihak ketiga mempunyai kesepakatan bahwa dalam pengangkutan sampah ini harus terealisasi dan tuntas, sehingga tidak ada penampakan tumpukan-tumpukan sampah”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Veronica sebagai salah satu staff pengelola Mall Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2021 tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“Dari pihak Mall mempunyai kesepakatan untuk mengelola sampah dari Dinas agar sampah-sampah itu tidak bertumpuk setiap harinya, dan langsung dibuang ke TPA”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa fakta yang terungkap sejalan dengan faktor Komitmen Para Pelaksana bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Pekanbaru mempunyai kesepakatan kepada Pihak Mall supaya tidak terjadi penumpukan sampah di Mall.

3.1.2 Adanya Pemberian Insentif atau Imbalan

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan cara menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Weni Arizona S.Km pada tanggal 7 Juli 2021 sebagai Bidang Pengelolaan Sampah mengenai pemberian insentif (imbalan), beliau mengatakan bahwa :

“Untuk pemberian insentif (imbalan) itu tidak ada, karena terbatasnya anggaran yang disediakan, untuk masalah gaji staff atau pegawai itu diberikan satu bulan sekali. Dan sanksi bagi yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) itu yaitu berupa pemotongan upah gaji”

Mengenai pemberian insentif (imbalan) , peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Reino sebagai staff di Workshop pada tanggal 7 Juli 2021, beliau mengatakan bahwa :

“Seharusnya untuk masalah upah atau gaji itu pemerintah harus menyediakan imbalan untuk staff atau pegawainya, apalagi untuk petugas lapangan, karna dengan demikian juga untuk memotivasi para staff atau pun petugas lapangan yang bekerja lewat dari waktu nya bekerja, sehingga supaya dalam artian lebih gigih jika ada imbalan yang sesuai”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa yaitu, Untuk pemberian insentif

(imbalan) itu tidak ada, karena terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

2. Faktor Penghambat

2.1 Stakeholder atau Pelaku

Dalam hal guna Implementasi kebijakan, perlu cakupan implementasi yang luas, maka seharusnya semakin besar pula agen yang terlibat. Pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta) dan bank-bank sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Weni Arizona S.Km pada tanggal 7 Juli 2021 sebagai Bidang Pengelolaan Sampah mengenai pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah 3R ini, ia mengatakan bahwa :

“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mengangkut sampah di tempat-tempat komersial bekerja sama dengan pihak ketiga dan bank-bank sampah. Sampah-sampah yang diangkut oleh petugas pengangkut sampah di TPS dan dibawa ke TPA kemudian dilakukan pemilahan pihak dari bank sampah supaya bisa diolah menjadi barang yang bisa dijual atau yang bernilai guna”

Mengenai masalah pihak-pihak yang terkait, penulis juga melakukan wawancara dengan dengan Bapak Reino sebagai staff di Workshop pada tanggal 7 Juli 2021 , beliau mengatakan bahwa :

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memang ada melakukan kemitraan atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang pengangkutan sampah, selain lebih efisien juga memudahkan

pekerjaan dari pihak dinas, selain bekerjasama dengan pihak ketiga, kami juga bekerjasama dengan bank-bank sampah agar proses pemilahan sampah bisa dipilah dan diolah menjadi barang yang bisa dijual kembali, seperti botol aqua, plastic, bungkus permen, bisa diolah menjadi barang nilai guna”

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Haryanto sebagai salah satu staff di Pasar Sukaramai Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2021 tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“Untuk proses pengangkutan sampah nya, sampah sejauh ini masih ada tumpukan-tumpukan sampah di tepi-tepi pasar, lamanya pengangkutan sampah dari pihak terkait mengakibatkan terjadi penumpukan ditepi-tepi pasar, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak enak dipandang”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa fakta yang terungkap tidak sejalan dengan faktor Stakeholder atau pelaku, bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dari segi petugas pengangkut sampahnya masih kurang efektif.

2.2 Komitmen Pelaku

Komitmen adalah salah satu faktor untuk menjalankan suatu proses kebijakan yang berhubungan dengan tekad dan kemauan yang kuat dari pimpinan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

2.2.1 Adanya Sarana dan Prasarana

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementator mungkin mempunyai jumlah staff yang memadai, paham apa yang harus dilakukan , dan juga memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas seperti sarana dan prasarana

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil atau akan menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan.

Mengenai masalah Sarana dan Prasarana, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agus Salim, S.Sos sebagai Seksi Sarana dan Prasarana pada tanggal 7 Juli 2021, ia mengatakan bahwa :

“Dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menyediakan tong sampah 3R sesuai dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 yang berlaku, dan itu sudah kami terapkan di tempat Central Komersial Kota Pekanbaru untuk menangani agar di tempat-tempat tersebut terlihat tertib dan bersih”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Veronica sebagai salah Staff pengelola Mall Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2021 tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“Di Mall pekanbaru tidak ada disediakan tong sampah 3R, di Mall Pekanbaru sendiri masalah tong sampah disediakan oleh pihak mall sendiri, dan masalah pengangkutan sampah nya sendiri dari pihak mall sendiri yang langsung antar ke Tempat Pembuangan Akhir”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan dengan Bapak Haryanto sebagai Pengelola Pasar Sukaramai Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2021 tersebut, ia menjelaskan bahwa:

“Di Pasar Sukaramai bisa dilihat sendiri bahwa masalah tong sampah 3R tidak ada disediakan tong sampah 3R oleh pihak pemerintah, biasanya langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Euis sebagai masyarakat umum diwilayah pasar Sukaramai pada tanggal 10 Juli 2021, yang mengatakan bahwa:

“Tong sampah yang saya tahu cuma ada satu Tempat Penampungan Sampah Sementara untuk sampah pasar di Sukaramai, itu pun masyarakat

umum juga membuang sampah disit, sampai sejauh ini belum ada terlihat ting sampah 3R di Pasar Sukaramai ini”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai faktor adanya sarana dan prasarana oleh pihak Pemerintah tidak ada menyediakan tong sampah 3R.

2.3 Kerumitan Yang Melekat Pada Proyek Tersebut (Faktor Ekonomi, Faktor Teknis)

Untuk menilai kinerja sebuah implementasi public dilingkungan ekonomi sosial dan politik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turun mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itulah upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Ada 2 sub indicator dalam lingkungan ekonomi dan teknis yaitu kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan membayar retribusi sampah.

2.3.1 Kesadaran Membuang Sampah Pada Tempatnya

Kebiasaan membuang sampah sembarangan jika dibiarkan dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang berbahaya. Sehingga perlunya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Weni Arizona S.Km pada tanggal 7 Juli 2021 sebagai Bidang Pengelolaan Sampah mengenai sub indicator kesadaran membuang sampah pada tempatnyaa, ia mengatakan bahwa :

“Masyarakat merupakan peran penting dalam menjaga lingkungan lingkungan sekitar agar tetap bersih. Kesadaraan dari masyarakat lah yang menjadi penentu agar lingkungan kita tetap terjaga . tetapi

kebanyakan dari masyarakat kita tidak menyadari hal itu, dan apabila terdapat Operasi Tangkap Tangan (OTT) maka kami akan memberikan sanksi sebesar Rp.250.000,00 yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti simpulkan bahwa peran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat wajib menjaga lingkungan tempat tinggalnya agar terlihat bersih dan tidak merusak pandangan.

2.3.2 Membayar Retribusi Sampah

Dana dari hasil retribusi sampah kebersihan Kota Pekanbaru dipungut langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Weni Arizona S.Km pada tanggal 7 Juli 2021 sebagai Bidang Pengelolaan Sampah mengenai sub indicator membayar retribusi sampah, ia mengatakan bahwa :

“Untuk retribusi sampah, baik itu sampah mall atau pasar kami memungutnya 1 bulan sekali, dan berapa besarnya tergantung indeksinya. Akan tetapi banyak juga dari sebagian masyarakat yang menunggak pembayaran. Iuran retribusi sampah ini kami serahkan ke Pemerintah Daerah”

Tabel V.9: Tarif Retribusi Sampah

No	Sumber Sampah	Tarif Retribusi Kebersihan	
		Kategori I	Kategori II
1	Mall	Penyediaan TPA	Sumber TPA
		Rp.1000.000	Rp.6.000.000
2	Pasar	Kelas 1	Kelas 2
		Rp.250.000	Rp.150.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021

Selanjutnya peneliti melakukan observasi dilapangan dan mewawancarai dengan Ibu Novita sebagai masyarakat mengenai sub indicator membayar retribusi sampah, ia mengatakan bahwa :

“Dari pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi dengan masyarakat secara langsung mengenai tentang iuran sampah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan jawaban dari responden mengenai iuran retribusi sampah, pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat mengenai iuran retribusi sampah tersebut.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R di Central Komersial Kota Pekanbaru yang ditinjau dari 2 Faktor, yaitu faktor pendorong yang terdiri dari Komitmen Pimpinan Politik, Kemampuan Organisasi, Komitmen Para Pelaksana, dan Faktor Penghambat yang terdiri dari Aktor, Terdapatnya Komitmen, dan Kerumitan Yang Melekat Pada Proyek Tersebut (Faktor Ekonomi, Faktor Teknis), adapun hambata-hambatan atau kendala-kendala yang penulis ketahui meliputi :

1. Lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaksana yang tidak memenuhi aturan atau instruksi kebijakan
2. Lemahnya koordinasi antara pembuat keputusan
3. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pemilahan sampah 3 R kepada masyarakat setempat dengan baik.

4. Tidak ada kepatuhan dipusat-pusat keramaian mengenai tong sampah 3R
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilah sampah
6. Tidak adanya imbalan atau tunjangan dari pemerintah untuk staf atau petugas lapangan pengelolaan sampah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan yang dilakukan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara per indikator yang menjadi tolak ukur penelitian yaitu sebagai berikut:

Untuk sub indikator “Komitmen Pimpinan “ Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan yaitu tidak tersedianya fasilitas seperti sarana dan prasarana tong sampah 3R. Sehingga hasil penelitian untuk indicator “Komitmen Pimpinan” yaitu belum terlaksana.

Sub Indikator “Kemampuan Organisasi” Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan yaitu Lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaksana yang tidak memenuhi aturan atau instruksi kebijakan. Sehingga hasil penelitian untuk sub indicator “Kemampuan Organisasi” yaitu belum terlaksana

Sub Indicator “Stakeholder atau Pelaku” Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya dilapangan yaitu jumlah staf dikantor dan petugas lapangan memadai, tetapi kualitas dari petugas pengangkut sampahnya masih kurang. Sehingga hasil penelitian untuk Sub Indikator “Stakeholder atau Pelaku” yaitu belum terlaksana

Sub Indicator “Komitmen Pelaku” Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya dilapangan yaitu bahwa mengenai faktor adanya sarana dan prasarana oleh pihak Pemerintah tidak ada menyediakan tong sampah 3R. Sehingga hasil penelitian untuk Sub Indikator “Komitmen Pelaku” yaitu belum terlaksana

Sub Indicator yang keenam “ Kerumitan Yang Melekat Pada Proyek Tersebut (Faktor Ekonomi, Faktor Teknis)”. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya dilapangan yaitu, peran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat wajib menjaga lingkungan tempat tinggalnya agar terlihat bersih dan tidak merusak pandangan, mengenai iuran retribusi sampah pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat mengenai iuran retribusi sampah tersebut. Sehingga hasil penelitian untuk Sub

Indikator “Kerumitan Yang Melekat Pada Proyek Tersebut (Faktor Ekonomi, Faktor Teknis)” yaitu belum terlaksana

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran – saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang penulis berikan kepada pihak diatas adalah:

- a. Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksanaan Teknis pengelolaan sampah perlunya menegakkan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terkait
- b. Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksanaan Teknis pengelolaan sampah perlunya lebih menerapkan kepatuhan atau instruksi dipusat-pusat keramaian mengenai tong sampah 3R :
- c. Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksanaan Teknis pengelolaan sampah perlunya lebih menguatkan koordinasi antar pembuat keputusan atau kebijakan
- d. Kepada masyarakat, perlunya meningkatkan kesadaran dalam memilah sampah dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi penumpukan sampah dimana – mana supaya lingkungan tetap bersih dan sehat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku :

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Azwar A. ,1979, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Mutiara.
- Dwiyanto. 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy* Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Grindle, Merille S (ed.). 1980. *Politics and Policy Implementation in the third world*. New Jersey: Princeton University Press.

Islamy,M. Irfan. 2000, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.
Bumi Aksara, Jakarta.

Maksudi. 2017. *Dasar – Dasar Administrasi Publik: Dari Klasik Dan Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada

Mochtar M. 1987. *Kesehatan Masyarakat*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta.

Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Beraucracy*. Chicago: Dorsey Press.

Sedarmayanti, 2003 *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: CV. Mandar maju.

Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*, Yogyakarta: Kanisius.

Subarsono.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudaryono. 2017. *Pengantar Manajmen: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Sudrajat, 2006, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penabar Suwadaya

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik*. Riau: Alaf Riau

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama

Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.

Tahir. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Usman, Setiady, 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society* v 6 No. 4 p. 445-485.c1vi.

Widodo, 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.

Zaini, Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkarnain, happy Bone, 2002, *Kendala Terwujudnya Good governance*. Artikel.

Zulkifli, Yogiya. 2004 *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Jurnal-jurnal

Dharma Yanti, 2019. *Implementasi Pengelolaan Bank Sampah Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Bank Sampah Sekolah)*. Pekanbaru